

### **BAB III**

## **MUNCULNYA KONTRAS DALAM MEMBANTU PENEGAKAN HAM MELALUI PERAN SERTA UPAYANYA DALAM MELAKUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DI ASIA TENGGARA**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) telah berdiri selama 20 tahun di Indonesia. KONTRAS telah menjadi organisasi lokal yang diakui keberadaannya oleh masyarakat, serta NGO lainnya di Indonesia disebabkan oleh keaktifan KONTRAS dalam merespon isu-isu yang sedang berlangsung serta melakukan pengembangan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan NGO baik lokal maupun internasional seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Imparsial, LBH Jakarta, *Human right Working Group* (HRWG), *ASIAN Forum for Human Rights and Developments*, *Solidarity of Asian People Advocacy* (SAPA Forum), *The Asian Federation Against Involuntary Disappearances* (AFAD), *Asian NGOs Network on NHRI's* (ANNI), *Anti-Death Penalty Asia Network* (ADPAN), serta Amnesty International di Indonesia, yang berfungsi sebagai advokasi internasional KONTRAS (KontraS, 2015).

Keberhasilan KONTRAS dalam mengembangkan jaringan tidak terlepas dari peran KONTRAS dalam melakukan usaha penegakan dan mempromosikan HAM ke masyarakat dan juga upaya-Nya dalam membentuk jaringan kerjasama dengan aktor lain. Untuk lebih lanjut berikut berbagai peran dan upaya KONTRAS dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor yang memperkenalkan dan menegakkan HAM di masyarakat.

### **A. KONTRAS sebagai Salah Satu NGO Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Mengingat meningkatnya tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM membuat pentingnya peran aktor non-Negara seperti *non-governmental organization* ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini. Pentingnya peran NGO dalam membantu negara dalam menangani kasus HAM telah dijelaskan langsung dalam hasil Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dimana diakuinya bahwa NGO memiliki peranan penting dalam memajukan semua hak asasi manusia dengan kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam upaya membantu pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (Zen, 2006).

Salah satu contoh NGO yang aktif melakukan kegiatan hak asasi manusia adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), merupakan sebuah *non-governmental* di Indonesia yang berbasis tentang penanganan terhadap kasus penindakan orang hilang, namun juga berkembang menjadi sebuah organisasi yang juga menangani permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. KONTRAS didirikan pada 20 Maret 1998 dengan visi yaitu terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender, serta kemudian didukung juga dengan misi yaitu memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara, memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara, serta mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat

dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (KontraS, 2015).

Gambar 3.1 Logo Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan



Sumber: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

KONTRAS sendiri merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat independen yang berbasis di Jakarta, yang telah aktif memberi perlindungan pada para korban tindak pelanggaran HAM nasional, regional, maupun internasional. Track record KONTRAS sejauh ini bisa dilihat langsung melalui situ resmi <http://kontras.org/>. KONTRAS di Indonesia sendiri telah memiliki berbagai cabang antara lain KONTRAS Aceh, KONTRAS Jakarta, KONTRAS Surabaya, KONTRAS Sumatera Utara, KONTRAS Sulawesi, serta KONTRAS Papua. Pada awalnya KONTRAS berserta anggota lainnya setuju untuk melakukan pembentukan Dewan Federasi KONTRAS yang bertugas sebagai dewan yang mengurus dan mengkoordinasi segala kegiatan dari keanggotaan KONTRAS (KontraS, 2015).

Namun, pada akhirnya inisiasi pembentukan Dewan Federasi KONTRAS tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga sampai saat ini KONTRAS tidak memiliki lembaga khusus yang mengkoordinir secara langsung kegiatan seluruh keanggotaan cabang KONTRAS (Hasil Wawancara No.1 dan

no.3 dengan Raden Arif Nurfikri, Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Mei 2018). Faktor-faktor internal seperti keterbatasan tempat, pengurus, yang kemudian menjadi kendala direalisasikannya inisiasi tersebut (Hasil Wawancara no.1 dengan Raden Arif Nur Fikri Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Mei 2018). Dibalik kegagalan pembentukan Dewan Federasi KONTRAS ini, hubungan kerjasama KONTRAS dengan KONTRAS seluruh Indonesia masih berjalan dengan baik, terlihat dari berbagai kerjasama dalam proses tukar informasi dan kegiatan-kegiatan promosi penegakan hak asasi manusia baik di Indonesia maupun internasional (Hasil Wawancara no.1 dan no.2 dengan Raden Arif, Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Mei 2018).

KONTRAS sejauh ini bertindak sebagai “social movement” yang ikut aktif merespon dan melakukan advokasi serta pendampingan terhadap korban tindak pelanggaran hak asasi manusia (Hasil Wawancara no.11 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018). Disamping itu, KONTRAS juga aktif melakukan promosi hak asasi manusia melalui berbagai media komunikasi seperti koran, dan media sosial lainnya. Atas dasar ini, KONTRAS dalam melakukan aktivitasnya tergolong kedalam NGO yang berlabel mobilisasi. Menurut Philip D. Eldridge, NGO dengan label mobilisasi adalah NGO yang memusatkan perhatian program dan kegiatannya pada pendidikan dan mobilisasi masyarakat terhadap isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia (HAM), status perempuan, hak- hak warga sipil, hak kepemilikan, serta anak-anak terlantar dan gelandangan. Program dan kegiatan KONTRAS pada pendidikan terlihat dari aktifnya KONTRAS dalam melakukan kuliah umum, seminar, diskusi publik, dan melakukan berbagai pameran tindakan pelanggaran, yang semua aktivitas ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak asasi manusia dan ikut membantu meminimalisir tindakan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Pengetahuan tersebut setidaknya dapat dijadikan dasar perbaikan kelangsungan berkehidupan oleh masyarakat.

Disamping itu, KONTRAS juga aktif dalam merespon serta memberi tanggapan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun internasional, seperti laporan KONTRAS terhadap kejahatan manusia dan pembantaian etnis Rohingya ke AICHR (Pattihua, 2017). Laporan ini dilakukan KONTRAS sebagai bentuk kekhawatiran KONTRAS terhadap pelanggaran yang terjadi dan keinginan yang kuat menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, KONTRAS juga sering memberi tanggapan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti yang baru-baru ini terjadi terkait penembakan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak begal dalam menyambut ASIAN Games di Jakarta. KONTRAS menilai tindakan tersebut tidak perlu dilakukan dan mendorong aparat kepolisian untuk mengadili secara hukum, sebab pelaku tindak kekerasan juga memiliki hak untuk diadili secara hukum bukan melalui kekerasan (KONTRAS via Twitter).

Melihat keaktifan KONTRAS dalam merespon berbagai kasus ini, menjadikan KONTRAS sebagai salah satu contoh NGO yang patut diperhitungkan di Indonesia dan internasional. Berbagai organisasi internasional mengakui kinerja dan keaktifan KONTRAS seperti yang dilakukan oleh ASIAN Forum melalui via Twitter, sebagai berikut:

Gambar 3.2 Postingan akun media sosial Twitter milik Forum Asia pada Maret 2018



Sumber: <https://twitter.com/kontrasupdates>

Melihat fakta di atas, KONTRAS bukan hanya sebagai organisasi yang aktif mempromosikan serta menegakkan nilai-nilai HAM tapi juga turut menjalin hubungan kerjasama yang kuat dengan organisasi baik lokal dan internasional dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi penegak HAM.

## B. Peran KONTRAS dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Menurut David Lewis yang memperkenalkan istilah “*voluntary associations*” pada sebuah NGO, NGO didefinisikan sebagai bentuk aktor yang memiliki kepedulian dalam merubah sebuah lingkungan kearah yang lebih baik, untuk pencapaiannya diperlukan usaha yang besar dalam proses merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, KONTRAS, sebagai sebuah NGO yang didirikan untuk

menangani kasus pelanggaran HAM dan kasus orang hilang, dalam segala aktivitasnya harus aktif dalam memberikan perlindungan kepada rakyat serta pendidikan kepada masyarakat akan HAM sehingga masyarakat paham dengan pentingnya penghormatan HAM di kehidupan sehari-hari.

Pengimplementasian KONTRAS sebagai NGO di Indonesia yang menginginkan adanya perubahan keadaan HAM menjadi lebih baik dimulai sejak KONTRAS didirikan. KONTRAS sendiri didirikan dilatarbelakangi oleh kondisi dari penegakan HAM di Indonesia yang masih lemah. Sebelum berdirinya KONTRAS, penegakan HAM di Indonesia masih lemah dimana banyaknya tindakan pelanggaran HAM pada saat itu. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi seperti tidak adanya kebebasan berpendapat, diskriminasi, penyiksaan/penganiayaan, penculikan dan penghilangan secara paksa, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kejadian tersebut kemudian bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi antara lain kasus pulau buru 1955-1965, dimana terjadinya penangkapan, pembunuhan massal oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB); hukuman mati terhadap residivis, bromocorah, gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai "penembakan misterius" yang terjadi sepanjang 1981-1985 di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung; kasus tanjung priok 1984-1987, kebijakan yang mewajibkan ABRI mengambil tindakan represif untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrem yang harus dicegah dan ditumpas seperti penanganan G 30 S; peristiwa Talangsari 1984-1987 dimana terjadi penyiksaan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa; operasi militer di Aceh tahun 1989-1998 yang melakukan penyiksaan/penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan secara paksa; pembunuhan misterius terhadap Petrus; kasus trisaksi yang menewaskan 4 mahasiswa; kasus penculikan dan penghilangan secara paksa pada tahun 1997-

1998 terhadap aktivis pro demokrasi; serta diskriminasi terhadap kaum China di Indonesia (Kristian Erdianto, 2015).

Setelah Orde Baru runtuh, di era reformasi masyarakat mulai memiliki kesadaran akan isu-isu HAM yang diikuti dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut, serta semakin banyaknya pengaduan kasus pelanggaran HAM. Masyarakat juga menuntut pemerintah mulai bertindak aktif dalam melakukan peningkatan perlindungan HAM. Faktor tersebut kemudian yang menjadi salah satu alasan berdirinya KONTRAS.

Meskipun pada akhirnya KONTRAS telah berhasil terbentuk, KONTRAS pada kenyataannya sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut KONTRAS, hal ini dinilai karena ketidaksiapan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia. KONTRAS menilai sampai saat ini pemerintah masih saja berfokus pada menstabilkan perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai macam bentuk diplomasi Indonesia dengan aktor-aktor lain. Hal ini kemudian yang memunculkan kekecewaan KONTRAS terhadap kinerja serta hukum di Indonesia.

Hukum Indonesia dewasa ini, masih dinilai belum adil dalam proses penyelesaian masalah. Terlebih lagi baru-baru ini, KONTRAS memberi kritik terhadap kasus adanya inisiasi untuk mengimplementasikan hukuman mati di Indonesia. KONTRAS sebagai NGO HAM di Indonesia menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan hak untuk menerima segala bentuk proses peradilan yang adil. Selain itu, KONTRAS juga sering mengkritisi kinerja dari pemerintah yang lambat merespon terkait penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus pembunuhan aktivis HAM, seperti pada contoh kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan salah satu aktivis HAM dari KONTRAS yang aktif melakukan penegakan HAM di Indonesia. Sejak terbunuhnya

Munir hingga sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti alasan dibalik terbunuhnya Munir. KONTRAS merasa sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memberikan tindakan yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai macam aksi dan tuntutan telah dilakukan KONTRAS dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Dibalik terjadinya beberapa kasus pembunuhan dan hilangnya beberapa aktivis HAM di Indonesia maupun internasional ini secara tidak langsung memberikan tamparan keras terhadap Indonesia mengenai situasi keamanan bagi para pejuang HAM di tanah air. Padahal kehadiran para pejuang HAM ini dapat membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan, mempromosikan dan memajukan penegakan HAM di Indonesia. Seperti yang diketahui, sampai saat ini Indonesia masih memerlukan para aktivis HAM dalam memberikan edukasi HAM kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, dalam mewujudkannya KONTRAS melakukan berbagai upaya dalam menjalankan perannya sebagai badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberian pendidikan yang dapat dilakukan melalui, pertama adalah dibangunnya Sekolah HAM oleh KONTRAS, sekolah tersebut bernama Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) merupakan sebuah program yang dibuat oleh KONTRAS dengan melibatkan Mahasiswa kedalam kegiatan tersebut. Adapun program ini dijalankan dalam kurun waktu 3 minggu, seperti contoh yang terjadi pada tahun 2015 dimana SeHAMA dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 18 Agustus 2015 yang melibatkan kurang lebih 30 peserta dari seluruh Indonesia (KontraS, 2015). SeHAMA sendiri dibentuk sebagai upaya KONTRAS untuk memperkenalkan HAM lebih mendalam kepada para peserta, melalui pemberian materi berupa isu-isu politik, ekonomi, hak-hak sipil, sosial budaya, kampanye HAM, kesetaraan gender,

serta pemberian kegiatan lapangan yang melakukan observasi langsung kepada para peserta ke daerah-daerah yang memiliki tingkat pelanggaran HAM yang cukup tinggi. SeHAMA sendiri melibatkan berbagai narasumber ahli sebagai pemberi materi antara lain Sugeng Bahagijo perwakilan dari INFID, Dina Hapsari dari UNHCR, Rocky Gerung dari IU, serta Robertus Robert dari UNJ (KontraS, 2015).

Gambar 3.3 Foto Peserta Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa tahun 2015



Sumber: <http://kontras.org/home/index.php?module=kegiatan&id=135>

Dibentuknya SeHAMA ini memberi peluang bagi KONTRAS untuk menanamkan paham-paham yang mendalam akan HAM kepada masyarakat melalui bantuan para Mahasiswa yang terlibat.

Kedua, kegiatan diskusi publik, seminar dan *workshop*, KONTRAS beserta para anggota memiliki agenda rutin berupa diskusi publik, seminar, serta *workshop* yang senantiasa membahas isu-isu HAM yang hangat dan perlu untuk dijadikan perhatian publik. Biasanya kegiatan diskusi publik ini dilakukan ditempat-tempat umum, seperti café, bahkan di universitas-universitas di Indonesia. Kegiatan diskusi publik, seminar, maupun *workshop* biasanya mengundang para korban tindak pelanggaran HAM, para pakar HAM, serta masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya saling bertukar

informasi dan pandangan dalam upaya mencari solusi ataupun penanganan yang tepat terhadap suatu isu dan meningkatkan kesadaran manusia akan tindakan-tindakan HAM/isu-isu lainnya yang berkembang di masyarakat.

Gambar 3.4 Foto Diskusi Publik di Universitas Khatolik Parahyangan Bandung



Sumber: <http://kontras.org/home/index.php?module=kegiatan&id=103>

Ketiga, pameran foto, KONTRAS menjadikan pameran foto sebagai upaya untuk memperkenalkan berbagai contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia serta internasional. Pameran foto dilakukan sebagai symbol keprihatinan para pejuang HAM yang hingga hari ini pemerintah masih belum memberikan perlindungan yang berarti terhadap para pejuang HAM yang ada. Pameran foto ini dilakukan atas dasar menunjukkan keinginan para pejuang HAM dalam upaya-Nya mewujudkan proteksi yang lebih baik lagi terhadap para pejuang HAM yang ada di Indonesia dengan cara mengenalkan para pejuang HAM yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya menurut wilayah dan isu yang telah mereka perjuangkan.

Gambar 3.5 Pameran Foto KONTRAS di Auditorium Prof. Mattulada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Makassar tahun 2013



Sumber: <http://kontras.org/home/index.php?module=kegiatan&id=125>

Selain memiliki peran pendidikan, KONTRAS disisi lain juga memiliki peran advokasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pelanggaran HAM yang tidak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian masalah. Pembimbingan ataupun pendampingan yang dilakukan oleh KONTRAS merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap para korban tindak pelanggaran ataupun pihak-pihak yang memerlukan bantuan dalam memperoleh hak-hak mereka (Hasil Wawancara no.11 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018). Dalam menjalankan perannya KONTRAS biasanya melakukan observasi langsung terhadap kasus yang mereka hadapi. Penemuan-penemuan yang didapatkan selama obsevasi kemudian di laporkan kepada pihak yang berwenang. KONTRAS sendiri dalam menjalankan tugasnya hanya bertindak sebagai pihak ketiga yang berusaha mengadvokasi antara kedua belahpihak yang bermasalah sehingga menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian sebuah kasus (Hasil Wawancara no.11 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018).

### C. Upaya KONTRAS dalam Mengembangkan Jaringan ke Asia Tenggara

Berdasarkan peran-peran KONTRAS diatas, KONTRAS tidak hanya berhasil menunjukkan integritas mereka sebagai sebuah *social movement* yang selalu berupaya mewujudkan penegakan dan mempromosikan HAM di Indonesia namun juga mulai membangun citra yang positif di lingkungan masyarakat. Bukti nyata dari berbagai aktivitas KONTRAS yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat menjadikan KONTRAS sebagai NGO yang berkredibilitas dikalangan para aktivis pembela HAM, mahasiswa, media, serta pejabat Negara. Sikap kritis KONTRAS ini sering ditunjukkan tidak hanya dalam merespon berbagai isu-isu HAM di Indonesia saja tetapi mulai berkembang ke ranah internasional. Hal ini terbukti dari berbagai macam program kerjasama yang dilaksanakan oleh KONTRAS dengan berbagai INGO lainnya, seperti kerjasama pelaksanaan diskusi publik, konferensi, serta tindakan menekan aktor yang lebih kuat untuk terlibat aktif dalam mengupayakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM.

Terbentuknya berbagai kerjasama ini dilatarbelakangi oleh keaktifan KONTRAS dalam menjalankan fungsi kerjasama dengan Negara atau NGO lain dalam upaya advokasinya melalui pengembangan jaringan di ranah internasional, karena adanya keinginan KONTRAS yang kuat dalam upaya membantu Negara mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran HAM yang berkembang di ranah internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri saat ini telah mendapat perhatian internasional atas segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat ini. Dengan semakin kompleksnya permasalahan HAM di Asia Tenggara dan adanya kekecewaan KONTRAS terhadap peran Negara dan Lembaga HAM di ASEAN yang dinilai gagal dalam menjalankan perannya, mengakibatkan pentingnya pengembangan jaringan oleh KONTRAS di Asia Tenggara tersebut (Affan, 2017).

Dalam upaya melakukan pengembangan jaringan ini, diperlukannya sebuah strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah NGO untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai dengan pandangan Keck & Sikkink melalui teorinya tentang *Transnational Advocacy Network* (TAN), NGO dapat melakukan pengembangan jaringan dengan cara persuasi, sosialisasi, dan bahkan kadang dengan sebuah tekanan serta juga menggunakan strategi/tipologi taktik yaitu tipologi *information politic*, *symbol politic*, *leverage politic*, dan *accountability politic* (Sikkink, 1999). Namun, disini, berdasarkan aktivitas dan peran KONTRAS, KONTRAS sendiri telah melakukan tipologi taktik atau strategi yang biasanya dilakukan oleh NGO dalam memperjuangkan tujuannya melalui 3 cara yaitu pertama, *information politic*, KONTRAS berdasarkan tipologi ini berupaya melakukan pengumpulan informasi melalui observasi pada kasus yang ingin diteliti sebagai dasar untuk mengetahui lebih dalam terhadap kondisi yang sebenar-benarnya terjadi dalam sebuah permasalahan HAM yang sedang terjadi, kemudian menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar untuk mengambil sebuah kebijakan (Hasil Wawancara no.2 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018). Hal ini terjadi seperti pada kasus Rohingya. Seperti yang diketahui kasus Rohingya hingga saat ini masih menjadi perbincangan internasional dengan segala polemik yang ada. Kompleksnya permasalahan yang menyangkut kelangsungan hidup orang banyak dan tidak adanya penyelesaian permasalahan yang berarti ini kemudian mendorong KONTRAS untuk ikut berkontribusi dalam membantu mencari penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga, dalam upaya KONTRAS tersebut, KONTRAS melalui kerjasama dengan ASIAN Forum membentuk Tim Pencari Pakta ke Bangladesh dimana para pengungsi korban kasus Rohingya mengungsi (Handayani, 2018).

Setelah terbentuknya Tim Pencari Pakta, Tim tersebut melakukan observasi langsung terhadap para korban untuk

mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan mengumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Berdasarkan fakta yang diperoleh dibantu dengan kerjasama dengan Tim Pencari Pakta PBB, korban kasus Rohingya saat ini telah banyak mengungsi ke Negara-negara tetangga seperti Bangladesh, serta Indonesia. Para korban mengalami krisis bantuan seperti akses sanitasi, pendidikan, serta kesehatan. Kondisi tempat tinggal para pengungsi juga dalam keadaan tidak baik dimana, para pengungsi di Bangladesh masih dihadapkan dengan kondisi alam yang buruk yaitu banjir yang masih sering terjadi di daerah tersebut, tidak hanya itu minimnya bantuan dana dan adanya penarikan diri dari beberapa organisasi internasional yang diakibatkan oleh adanya pembatasan akses informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar maupun Bangladesh (Handayani, 2018) menyebabkan segala bentuk bantuan masih sangat diperlukan oleh para korban. Selanjutnya, dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Pencari Pakta ini kemudian dipublikasikan oleh KONTRAS bersama ASIA Forum melalui siaran pers maupun diskusi umum dengan berbagai NGO sehingga masyarakat internasional serta organisasi internasional mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi dan bersedia ikut mendukung serta membantu segala proses penyelesaian permasalahan tersebut (Hasil Wawancara no.2 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018).

Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut melalui strategi *information politic* ini diharapkan masyarakat mulai memberi perhatian terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, dalam upaya mendorong penyelesaian masalah yang lebih baik, KONTRAS merasa pada saat ini di Asia Tenggara sendiri, segala kegiatan dan aktivitas sebuah NGO masih terbatas karena prinsip *ASEAN Way* yang dianut oleh ASEAN (Hasil Wawancara no.2 dan no.6 dengan Paulus, Staff Divisi Advokasi Internasional, pada tanggal 30 Mei 2018). Hal ini sesuai dengan pandangan KONTRAS yang disampaikan langsung oleh Puri Kencana Putri, wakil koordinator KONTRAS, "*problem di*

*kawasan ASEAN, kita terjebak pada semangat komunal kedaulatan, semangat komunal nonintervensi yang menghambat kita untuk mendorong kemajuan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia” (Affan, 2017).*

Oleh sebab itu, KONTRAS dalam situasi ini sangat berharap peran pemerintah Indonesia dalam membantu penyelesaian permasalahan tersebut. KONTRAS menilai hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan Myanmar akan menjadi faktor pendorong yang membantu menyelesaikan krisis tersebut, terbukti dari diterimanya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsuadi oleh pemimpin tertinggi Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi di Myanmar (Affan, 2017). Dorongan KONTRAS terhadap keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kasus Indonesia terlihat dari Surat Terbuka yang dibuat oleh KONTRAS yang ditujukan langsung kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsuadi pada Rabu, 6 September 2017 (KontraS, 2017). Disamping itu, KONTRAS juga mengeluarkan *Joint Statement on The Rohingya Crisis from The SAPA Working Group* yang merupakan hasil kerjasama KONTRAS dengan organisasi anggota *Solidarity for ASIAN People Advocacies Working Group on ASEAN* (Khoirino, 2018). Berdasarkan surat terbuka dan *Joint Statement* ini, KONTRAS akan terus berupaya mendorong peran aktif Indonesia untuk terlibat dalam kasus ini dan juga sebagai Negara penghubung dengan Negara-negara yang ingin membantu (Affan, 2017). Sehingga, berdasarkan fakta ini, KONTRAS telah menjalankan strateginya sesuai dengan tipologi taktik TAN yaitu *accountability politic*, tipologi yang berupaya menggunakan aktor yang lebih kuat sebagai sarana untuk mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat.

Tidak sampai disitu, upaya KONTRAS dalam menunjukkan perannya dalam melakukan pemajuan HAM juga dapat dilihat melalui aksi-aksi KONTRAS dalam menyuarakan pendapat mereka terkait isu-isu HAM yang sedang berkembang. Seperti keikutsertaan KONTRAS dalam aksi

solidaritas internasional terhadap kasus hilangnya aktivis HAM Sombath Somphone dari Laos ke Kedutaan Besar Negara Laos dan mengajak publik untuk melakukan pengiriman teks via fax, email ke Kedutaan Besar Laos melalui media sosial twitter dan facebook (Farah Fathurrahmi, 2014). Tidak berhenti sampai disitu, KONTRAS bersama AFAD (*Asian Federation Against Involuntary Disappearance*) ikut membantu dalam mengadvokasi permasalahan tersebut ke pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia bersedia untuk terlibat membantu penyelesaian permasalahan tersebut (Farah Fathurrahmi, 2014). Selain itu, KONTRAS juga ikut aktif melakukan aksi turun kejalan dan aksi solidaritas di kedutaan besar Myanmar dalam menyampaikan pendapat mereka mengenai krisis Rohingya yang masih berlangsung. Aksi-aksi ini merupakan kegiatan KONTRAS dalam mengupayakan adanya pemajuan HAM dan hal ini sesuai dengan tipologi *symbol politic*, merupakan suatu upaya untuk menarik perhatian dengan memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat yang ditempuh dengan cara menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi tertentu.

Tidak hanya sebatas melakukan tipologi taktik sesuai dengan teori TAN, KONTRAS juga telah mulai membuka kerjasama strategis dengan berbagai organisasi regional Negara kawasan Asia Tenggara seperti ALTSEAN Burma (Myanmar), PAHRA (Filiphina), serta Malaysia dengan Suaram. Kerjasama yang terbentuk ini memberikan harapan yang besar kepada KONTRAS dalam proses advokasinya dalam menanggapi berbagai isu-isu HAM yang berkembang di kawasan Asia Tenggara (Hasil Wawancara dengan Fatya Maulidiyanti, Kepala Divisi Advokasi Internasional via Email pada tanggal 20 Juli 2018).

#### **D. Kolaborasi KONTRAS Bersama INGO dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia**

Selain aktif melakukan pengembangan jaringan dengan bergabung keberbagai organisasi internasional dan membentuk kerjasama dengan NGO Negara anggota ASEAN. KONTRAS juga aktif melakukan aktivitas berupa kolaborasi dengan NGO internasional dalam melakukan event seperti Konferensi, diskusi publik, pameran foto, seminar, serta *workshop*. Beberapa event yang berhasil diadakan KONTRAS antara lain kegiatan “Pameran Foto Pembela HAM Internasional” pada 5 sampai 9 September 2013 yang diselenggarakan di Gallery Melly’s Garden, Kebon Sirih, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat sipil terhadap para pejuang HAM yang gugur dalam menjalankan tugasnya, sehingga perlu adanya pemberian penghormatan terhadap para pembela HAM tersebut. Pameran ini merupakan program kerjasama antara KONTRAS dengan AFAD, dimana pameran ini berhasil menampilkan 25 foto para pejuang HAM dari berbagai Negara yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang HAM. Selain itu, pameran ini dilakukan juga dengan tujuan lainnya yaitu sebagai bentuk peringatan kematian oleh KONTRAS terhadap kematian salah satu anggota mereka yaitu Munir Said Thalib. Pameran ini berlangsung selama 4 hari, yaitu dimulai pada tanggal 5 September sampai dengan 9 September 2013. 25 foto yang dipamerkan dalam kegiatan ini mencakup antara lain Aisyah (Pejuang wanita dari Kontu-Muna), Udin (jurnalis), Munir, Tama S. Langkun, Widji Thukul, Pdt. Palti Panjaitan, merupakan para pejuang HAM dari Indonesia, serta Sombath Somphone (Laos), Nabeel Rajab (Bahrain), Hilaria Supa Huaman (Peru), Adilur Rahman Khan (Bangladesh), dan beberapa pejuang lainnya yang merupakan para pejuang HAM Internasional. Tidak sampai disitu, pameran ini juga turut mengundang beberapa pembela HAM lainnya seperti Olga Hamadi (Koordinator KontraS Papua), Souhayer Belhassen (mantan Presiden FIDH), Shui Meng (Istri dari Sombath Samphone), Suciwati (istri dari almarhum Munir Said

Thalib), dan terakhir Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumsel) (Farah Fathurrahmi, 2014).

Selanjutnya, KONTRAS juga pernah melakukan Konferensi HAM Regional dengan tema “Konsultasi Regional tentang ASEAN dan HAM” yang dilaksanakan di Jakarta pada Oktober 2013 (Farah Fathurrahmi, 2014). Konferensi ini dilakukan dengan tujuan membahas berbagai isu permasalahan HAM di Asia Tenggara dan bagaimana mekanisme HAM di Asia Tenggara, serta membahas kerangka kerja untuk mewujudkan keefektifitasan AICHR sebagai Lembaga HAM di Asia Tenggara. Konferensi ini berhasil menarik peserta sejumlah 80 anggota dari lebih 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN. Adapun dua isu utama yang menjadi agenda penting diadakannya konferensi ini adalah pertama, inisiasi tentang perlunya revisi *Terms of Reference* (TOR) yang harus dimulai pada tahun 2014. Dan yang kedua, adalah perihal permasalahan hak asasi manusia serta bisnis yang terjadi di Asia Tenggara (Farah Fathurrahmi, 2014).

Adapun hasil dari konferensi ini antara lain menuntut adanya penelaahan lebih lanjut terhadap TOR AICHR, dimana TOR AICHR harus dilaksanakan secara transparan, yang didukung oleh keterlibatan aktif dari berbagai pihak seperti masyarakat sipil, serta sumber finansial dan pembentukan sekretariat yang independen untuk mendorong kelembagaan agar lebih kuat (Farah Fathurrahmi, 2014). Selain itu, para peserta konferensi juga menilai bagaimana pentingnya peranan dari Indonesia dalam mendukung terjadinya peningkatan penegakan HAM dan demokrasi di ASEAN, karena sejak terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2011 dan track record Indonesia dalam menjalankan tugasnya, Indonesia dinilai telah terlibat aktif dalam proses mendukung pemecahan masalah di ASEAN (Farah Fathurrahmi, 2014). Untuk itu, peranan Indonesia hingga saat ini masih diharapkan agar terus berlanjut dalam upaya penegakan HAM di kawasan ASEAN.

Tidak hanya itu, KONTRAS juga berhasil melaksanakan Konferensi dengan tema “Pemolisian dan HAM Sub Kawasan Asia Tenggara”. Konferensi ini merupakan hasil kerjasama KONTRAS dengan Amnesty Internasional. Konferensi ini berlangsung selama 2 hari yakni dimulai pada tanggal 19 sampai dengan 20 November 2013 di Jakarta. Adapun peserta yang mengikuti konferensi ini yaitu para aktivis masyarakat sipil serta para pengacara Hak Asasi Manusia dari Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste dan Thailand. Kegiatan ini dilakukan guna pembahasan terhadap adanya tuntutan mengenai mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif dalam rangka menghadapi berbagai macam pelanggaran HAM dan hukum yang dilakukan oleh polisi dari masing-masing Negara. Tujuan dilaksanakannya konferensi ini adalah guna memahami lebih dalam berbagai hambatan dan perkembangan yang dialami oleh kepolisian di Negara anggota ASEAN, memetakan pelanggaran HAM yang berhubungan dengan kinerja kepolisian dan memahami pola pelanggaran yang dilakukan, memahami lebih lanjut mengenai mekanisme internal dan eksternal kepolisian untuk akuntabilitas kepolisian, berbagi pengalaman dalam kinerja yang berhubungan erat dengan kepolisian, dan yang tidak kalah penting ialah untuk memperluas jaringan sub-kawasan antara lembaga-lembaga yang memiliki kinerja yang berhubungan dengan kepolisian serta untuk peningkatan kapasitas (Farah Fathurrahmi, 2014).

Dan terakhir, saat ini, KONTRAS terlibat aktif menjadi *steering committee* untuk acara *ASEAN People's Forum* yang merupakan forum terbesar CSO se ASEAN, dan juga tergabung dalam koalisi *SAPA Task Force* yang merupakan kumpulan CSO se ASEAN yang diorganisir oleh Forum Asia untuk kerja kolaborasi HAM se ASEAN (Hasil Wawancara dengan Fatya Maulidiyanti, Kepala Divisi Advokasi Internasional via Email pada tanggal 20 Juli 2018). Koalisi ini sangat diperlukan dalam upaya untuk membantu penyelesaian permasalahan HAM yang lebih baik di Asia Tenggara. Sehingga dengan adanya forum ini segala masalah/isu-isu yang sedang berkembang dapat

didiskusi secara saksama dalam proses mencari solusi bersama (Hasil Wawancara no. 1 dengan Paulus, staff Divisi Advokasi Internasional pada tanggal 30 Mei 2018).

